

MENERKA SENTILAN AS UNTUK INDONESIA

Soroti Pelanggaran HAM PeduliLindungi hingga TWK KPK

Tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia diterpa 'gonjang-ganjing'. Kegaduhan dimulai saat situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia merilis tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satu yang disoroti adalah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Tak hanya itu, Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan aplikasi PeduliLindungi telah melanggar HAM bagi para warga. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mengaku tidak ambil pusing. Apalagi kenyataannya, jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sejatinya lebih rendah ketimbang AS. Menurut laporan, selama 2018-2021 ada 19 kali laporan terkait HAM. Sedangkan di 'Negeri Paman Sam' dilaporkan 76 kali dalam periode yang sama. Ada apa ini?

(Baca Hal 11)

GOVERNMENT (Hal.2)
Akses NIK
Berbayar Rp 1.000,
Ada Ancaman
Jual Beli Data

JADWAL IMSYAKIYAH

Ramadan 1443 H/2022 M (Wilayah Surabaya)

APRIL	IMSAK	SUBUH	MAGHRIB
19	04.05	04.15	17.29
20			17.28
21	04.04	04.14	17.27
22			
23			
24			
25			
26			17.26

BEBERAPA DUGAAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA YANG DISOROTI AS

1. TWK KPK DAN KASUS LILI PINTAULI

AS menyoroti masalah TWK KPK yang mengeliminasi 75 pegawai, termasuk penyidik Novel Baswedan. Tes ini merupakan bagian proses transisi mengubah status staf di lembaga anti rasuah menjadi pegawai negeri. Selain TWK, laporan HAM dari AS juga menyoroti kesalahan etik dari Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait kasus korupsi Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahril.

2. KORUPSI EDHY PRABOWO DAN JULIARI BATUBARA

Masalah lain yang jadi sorotan AS adalah korupsi yang dilakukan mantan Menteri

Sosial Juliari Batubara. Edhy Prabowo dinyatakan bersalah karena menerima suap dari pengusaha dan menyalahgunakan wewenangnya untuk mempercepat izin ekspor larva lobster. Pengadilan menghukum Juliari penjara 12 tahun, ganti rugi senilai Rp14,6 miliar, denda Rp500 juta, dan dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik selama empat tahun setelah akhir masa hukuman.

3. KASUS LUHUT DAN MOELDOKO

AS menyoroti laporan pencemaran nama baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Staf Presiden (KSP)

Moeldoko ke sejumlah pihak. Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia usai keduanya menuding bahwa Luhut memiliki konflik kepentingan ekonomi dalam polemik di Papua. Namun, Luhut membantah tuduhan tersebut. Sementara Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayoga dan Miftahul Huda atas tuduhan bermain dalam bisnis obat Ivermectin. Sebab, putrinya memiliki hubungan bisnis dengan PT Hansen Laboratories, produsen obat tersebut.

Lanjut Hal 11...

Akses NIK Berbayar Rp 1.000, Ada Ancaman Jual Beli Data

JAKARTA- Setiap lembaga yang mengakses NIK akan dikenai biaya Rp 1.000 setiap kali akses. Aturan peneanaan biaya itu sedang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemerintah pun diingatkan bahaya bila berbuntut jual beli data.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakhrolloh menegaskan, langkah pemerintah berencana menerapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam akses informasi kependudukan dan nomor induk kependudukan bukan menjual data pribadi penduduk. Jasa pelayanan akses data kependudukan, kata Zudan, diberikan kepada lembaga pengguna yang sudah terdata dan diverifikasi oleh Dukcapil. Ia memastikan data yang diberikan Dukcapil hanya sebatas verifikasi berbasis data benar (true) atau salah (false).

"Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya," papar Zudan dalam keterangan tertulis Minggu (17/4).

Zudan juga menjawab bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga keamanan data kependudukan ketika diserahkan kepada pihak ketiga. Ia mengaku, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak swasta yang ingin mengakses data dari Dukcapil, antara lain: telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (Proof of Concept), menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement) dan SPTJM (Surat Per-

tanggungjawaban Mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

"Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku," tegas Zudan.

Zudan juga menegaskan, pemerintah hanya akan membebaskan tarif PNBP untuk sektor swasta yang berorientasi mencari untung atau profit-oriented. "Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/ lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang berikan kepada per-orangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum," tegas Zudan.

Zudan menegaskan pemerintah tidak memiliki target penerimaan ketika program PNBP NIK berjalan. Ia memastikan PNBP tersebut dilakukan demi menjaga sistem dukcapil terjaga. Pemerintah tidak mengejar target keuntungan dari kebijakan PNBP NIK, kata dia. "PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna," kata Zudan.

Isu rencana PNBP data kependudukan berawal ketika anggota DPR IX Luqman Hakim (saat jadi wakil



(Ilustrasi) Bila lembaga diperbolehkan akses NIK dengan biaya Rp 1.000 dikhawatirkan potensi terjadi jual beli data. (Foto-istimewa)

ketua Komisi II) menyampaikan tentang potensi hilangnya 200 juta data penduduk karena perangkat keras penyimpanan atau server Dukcapil sudah tua dan tidak ada garansi. Ia juga menerima laporan bahwa server tersebut tidak ada yang berani memperbaiki.

Luqman, yang kala itu masih menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR RI, meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merespons masalah tersebut agar data kependudukan tidak hilang. Zudan pun mengakui memang ada masalah dalam server kependudukan yang sudah tua. Meski menjamin bahwa data kependudukan aman di backup server. Zudan mengakui pemerintah butuh biaya untuk pemeliharaan server. Ia sebut pemerintah akan

menerapkan PNBP untuk pemeliharaan server di masa depan.

Aturan Tak Masuk Akal

Terpisah pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai rencana peneanaan tarif Rp1.000 terhadap akses NIK sangat tidak masuk akal. Alasan di balik wacana tersebut pun dianggap mengada-ada. "Kalau alasannya untuk perawatan server, peningkatan pelayanan, aneh sekali. Semua itu seharusnya dibebankan kepada APBN. Sangat aneh kalau 10 tahun belum dirawat. Selama ini anggarannya kemana?" ujar Trubus.

Dalam setiap pengadaan barang dan jasa, ia menjelaskan, pemerintah pasti memiliki skenario perencanaan yang tidak hanya difokuskan pada saat pembelian saja. Pada saat pembelian, atau jangka pendek, pasti telah ditetapkan anggaran jatuh di kementerian/lembaga apa. Ketika perawatan atau masuk jangka panjang, pun semestinya demikian. "Kalaupun perawatannya berkala, tetap harus dibebankan kepada APBN. Kalau tujuannya menghemat APBN, tapi membebani rakyat, ya lebih aneh lagi itu. Semua aset negara itu tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat," tegasnya.

Meskipun nanti dalam pelaksanaannya pemerintah menargetkan beban pada lembaga profit oriented seperti perbankan, asuransi dan pasar modal, sangat terbuka lebar peluang bahwa lembaga-lembaga itu nantinya akan melimpahkan atau membagi beban juga kepada masyarakat. "Saat ini, beban rakyat sudah sangat berat. Harga kebutuhan-kebutuhan pokok sudah naik semua, mulai dari minyak goreng, BBM, pajak pertambahan nilai, belum lagi nanti tarif listrik dan LPG 3 kilogram. Jangan ditambah beban-beban lain lagi," tandasnya. (ashar,ist,rls/dya)

FAKTA-FAKTA IHWAL AKSES NIK BERBAYAR

1. UNTUK PERAWATAN SERVER

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrolloh, menyatakan selama ini biaya akses NIK di database kependudukan selalu digratiskan oleh pemerintah. Namun karena keperluan perawatan sistem server data kependudukan yang terbentur masalah biaya, Dirjen Dukcapil berniat menerapkan tarif. "Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyedia daftar pemilih," kata Zudan.

2. BESARAN TARIF BELUM FINAL

Saat ini ramai muncul pembebanan tarif akses NIK bakal senilai Rp1.000. Namun faktanya Kemendagri belum memastikan tarif final. Detail biayanya sedang dirumuskan dalam RPP PNBP dan belum dipastikan kapan akan diterapkan.

3. HANYA UNTUK LEMBAGA PROFIT ORIENTED

Dipastikan biaya itu hanya dibebankan pada lembaga profit oriented seperti bank, pasar modal dan asuransi. "Tidak perlu khawatir. Pemerintah sudah mengkaji mendalam. Untuk BPJS Kesehatan, bantuan sosial, pelayanan publik tetap gratis," katanya.

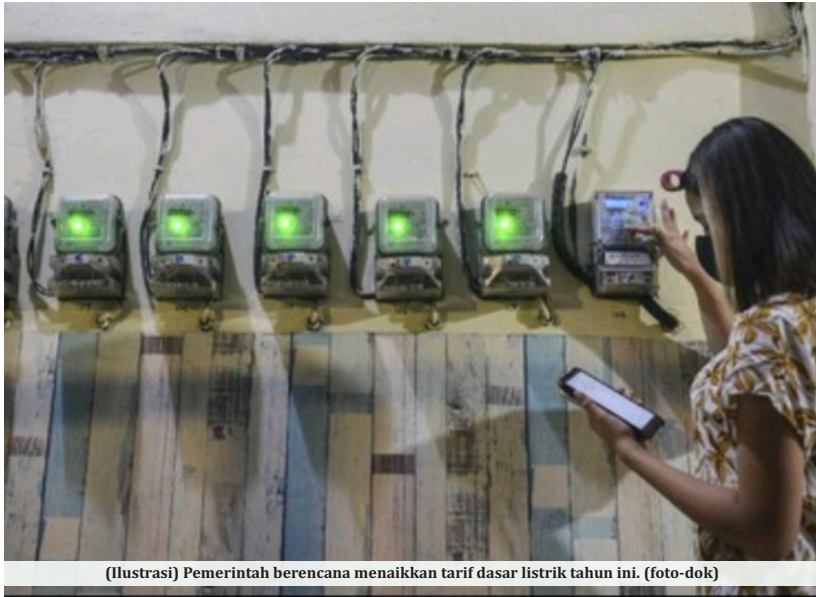
4. AJUKAN ALTERNATIF PENDANAAN

Kemendagri tak hanya menajaki pembebanan akses NIK untuk lembaga profit oriented. Mereka sedang mengajukan alternatif pendanaan pengelolaan server melalui Bappenas dan World Bank. Kemendagri juga menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data admin oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. "Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," ujar Zudan.



Rencana Kenaikan Tarif Daftar Listrik

DPR Sebut Alasan Pemerintah Mengada-ada



(Ilustrasi) Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik tahun ini. (foto-dok)

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat. DPR RI menyebut alasan pemerintah terlalu mengada-ada.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 2022. Apalagi jika alasan penyesuaian tarif listrik tersebut karena kenaikan harga migas internasional. Maka itu, Mulyanto yang juga sebagai wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menilai rencana pemerintah menaikkan TDL itu mengada-ada.

"Logika untuk menaikkan tarif PLN, sebagai akibat kenaikan harga migas global, ini kurang kuat, karena masalah ini tidak seberapa berpengaruh bagi biaya pokok pembangkitan (BPP) listrik PLN. Kontribusi sumber energi BBM untuk pembangkit listrik PLN secara nasional sangat kecil," kata Mulyanto dalam keterangan

tertulisnya, Minggu (17/4).

Dia menuturkan bahwa kontribusi sumber energi primer pada pembangkit listrik PLN secara nasional terutama adalah dari batu bara dan gas dengan total kontribusi sebesar 84 persen, dimana masing-masing 66 persen dari batu bara dan 18 persen dari gas. Sementara kontribusi dari air dan panas bumi sebesar 13 persen. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kontribusi dari sumber BBM pada pembangkit listrik PLN hanya sebesar 4 persen.

"Jumlah yang sedikit, terutama ada di Indonesia bagian timur," imbuhnya. Di sisi lain, lanjut dia, harga batu bara dan gas untuk pembangkit listrik dipatok tetap melalui regulasi DMO (domestic market obligation) dimana harga masing-masing USD 70 per ton untuk batu bara dan USD 6 per MMBTU untuk gas.

Dia menambahkan, tidak ada kenaikan harga batu bara dan gas untuk PLN. "Kalau kita ingin mendorong kinerja PLN, yang penting

dilakukan pemerintah justru adalah dengan membayar tunggakan dana kompensasi listrik. Untuk tahun 2021 tunggakan dana kompensasi listrik pemerintah sebesar Rp24,6 triliun," katanya.

Kemudian, dia menilai perlunya melakukan moratorium pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan program dedieselisasi. "Karena pembangkit listrik berbasis BBM ini bukan hanya mahal, namun juga kotor. Di dalam draf RUU EBT mutakhir dedieselisasi harus tuntas dilakukan pemerintah sampai tahun 2024," kata Mulyanto.

Dia melanjutkan, namun sayang praktiknya masih kontradiktif. "Karena baru saja kemarin (Jumat 15 April 2022), PLN meresmikan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia yang diberi nama Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara-1 berkapasitas 60 MW, yang berbahan bakar fosil. Ini yang harus kita evaluasi terus," pungkasnya.

Inflasi Bisa Tembus 4%

Seperti diketahui, Kementerian ESDM memberi sinyal kenaikan beberapa komoditas energi bersubsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) Peralite, Solar, LPG 3 kg, dan tarif listrik. Ekonom memperingatkan agar pemerintah tidak gegabah mengambil tindakan tersebut karena dampaknya berbahaya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov mengatakan kenaikan beberapa komoditas energi tersebut akan berdampak besar terutama ke masyarakat kalangan bawah. Kebijakan itu diperkirakan bisa menggerakkan inflasi di atas target pemerintah yang 2-4%.

"Pasti itu akan mendorong terjadinya inflasi di atas 4% kalau sampai kebutuhan tadi terutama yang dikonsumsi masyarakat kalangan bawah juga ikut-ikutan naik," kata Abra, Minggu (17/4).

Tak hanya itu, kenaikan harga komoditas energi bersubsidi juga diperkirakan akan memberi efek domino yang besar kepada harga barang lain. Contoh jika terjadi kenaikan tarif listrik pelanggan industri, otomatis berdampak ke biaya produksi. "Jadi masyarakat atau konsumen itu bisa menghadapi dua tekanan sekaligus yaitu inflasi dari rumah tangga dan dari sisi produsen itu akan merembet juga ke kenaikan harga barang yang lain," jelasnya.

Seperti diketahui bahwa kebutuhan energi merupakan pengeluaran tetap (fixed cost) bagi masyarakat yang sulit dikurangi. Di sisi lain penghasilan yang dimiliki tetap, otomatis kebutuhan lain harus dikorbankan sehingga konsumsi masyarakat akan tertekan. Kondisi itu diperkirakan dapat menggagalkan target pemerintah untuk membuat ekonomi pulih dengan pertumbuhan 5%.

"Target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% bisa terancam gagal juga karena kita tahu ekonomi Indonesia 55% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi rumah tangganya tertekan, otomatis target pemerintah untuk recovery di tahun ini juga bisa gagal," imbuhnya.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Eksekutif Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal. Dirinya menyarankan pemerintah tidak menaikkan Peralite, Solar, LPG 3 kg dan tarif listrik.

"Dampaknya akan besar (kalau naik) karena itu yang disubsidi, artinya yang sangat penting bagi masyarakat menengah ke bawah yang pada saat sekarang masih belum bisa pulih ekonominya," jelasnya.

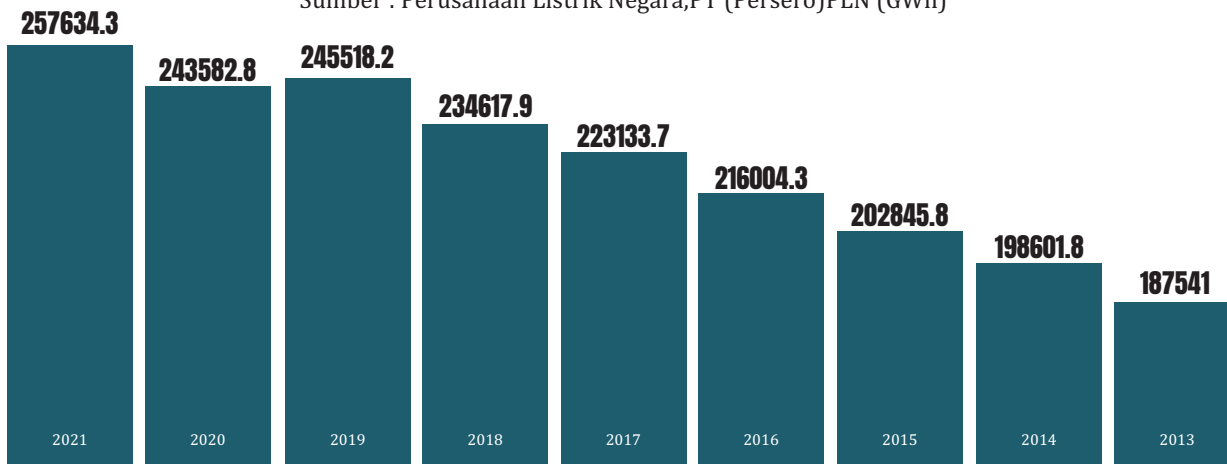
Daripada menaikkan harga komoditas energi tersebut, Faisal menyarankan agar pemerintah menambah subsidi untuk Pertamina dan PLN selama harga minyak dunia sedang tinggi. Ruang APBN dinilai mampu memenuhinya karena ada windfall dari naiknya harga komoditas sehingga meningkatkan penerimaan perpajakan.

"Ini yang semestinya bisa diambil untuk dialokasikan menambah subsidi agar mempertahankan harga yang ada sekarang. Dari APBN mestinya mampu untuk disalurkan ke Pertamina dan PLN untuk meneruskan program subsidi tersebut," bebernya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menegaskan meskipun di pasar global harga komoditas energi sedang mencapai level yang tinggi, pemerintah tidak menambah beban masyarakat secara drastis. "Kita pasti akan melakukan evaluasi-evaluasi, dan tidak mungkin kita akan membebaskan masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (16/4). (ashar,ant, ist/dya)

PENJUALAN ENERGI LISTRIK PLN (2013-2021)

Sumber : Perusahaan Listrik Negara, PT (Persero) PLN (GWh)



Perludem: Problem Politik dan Elektoral Pemilu 2019 Potensi Terulang



(Ilustrasi) Simulasi pemungutan suara Pemilu yang tahun 2024 nanti dijadwalkan pada 14 Februari. (foto-dok)

JAKARTA- Irisan tahapan pemilihan umum dan pilkada pada tahun 2024 membuat beban berat petugas penyelenggara pemilu yang berpotensi memengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas pemilu. Diperkirakan problem politik dan elektoral pemilu 2019 potensi terulang.

"Penyelenggara akan sulit bisa bekerja dengan baik dan maksimal bila bebannya bukan hanya besar, melainkan juga rumit dan kompleks," kata Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, Minggu (17/4).

Ketika berbicara soal tantangan Pemilu dan Pilkada 2024, Titi mengemukakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada)

pada tahun yang sama ini membuat atensi pemilu nasional lebih mendominasi.

Menuju 2024, menurut dia, hampir tidak ada ruang untuk melakukan reformasi sistem politik, sistem kepartaian, dan sistem pemilu. Maka, problem politik dan elektoral Pemilu 2019 potensial akan berulang.

Titi menjelaskan kompleksitas teknis pemilu memengaruhi kualitas dan kemurnian suara pemilih. Masalahnya, tingginya surat suara tidak sah (invalid votes) mencederai daulat rakyat. Pada Pemilu Anggota DPR RI 2019, misalnya, terdapat 17,5 juta suara tidak sah.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan pemilu, lanjut Titi, adalah gangguan terhadap hak pilih berupa praktik jual beli suara (vote buying) serta penyebaran misinformasi dan disinformasi yang bisa memengaruhi publik sehingga membuat keputusan yang salah pada pemilu dan pilkada.

Disebutkan pula bahwa pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama memicu pragmatisme partai akibat konsolidasi internal yang tidak optimal. "Karena ingin mengem-

balikan ongkos politik pemilu serta akibat soliditas internal yang belum sepenuhnya pulih pasca-pemilu, bisa memicu pragmatisme partai yang berdampak pada tumbuh suburnya praktik mahar politik. Ekseksnya dapat berupa meningkatnya tren calon tunggal," kata Titi.

Di lain pihak, kata dia, terdapat pula tantangan terbuka dari elite, seperti serangan terhadap prinsip konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan) yang merupakan arti-kulasi semangat reformasi dan komitmen dalam berdemokrasi. Misalnya, penundaan pemilu, per-panjangan masa jabatan, dan presiden tiga periode.

Selain itu, proses legislasi yang meninggalkan publik atau tanpa partisipasi publik yang bermakna. Titi lantas menyebut sejumlah undang-undang, seperti UU Cipta Kerja, UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi, UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Tantangan lain yang berasal dari elite politik adalah terjadi pemusatan kekuasaan dengan kontrol yang lemah dari kekuatan penyeimbang sebagai konsekuensi ambang batas pencalonan presiden dan politik akomodatif Presiden. Misalnya, pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas dan UU Cipta Kerja.

Hal lain yang menjadi sorotan Titi yang pernah terpilih sebagai Duta

Demokrasi International Institute for Electoral Assistance (International IDEA) adalah kriminalisasi aktivis masyarakat sipil oleh pejabat publik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027 sendiri telah menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah. Enam dari 7 anggota KPU RI masing-masing mendapat tugas menjadi penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Diketahui, 7 anggota KPU RI periode 2022-2027 resmi menjabat usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (12/4/2022). Mereka yakni Hasyim Asy'ari, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Setelah resmi menjabat, pada hari yang sama, 7 anggota KPU RI menggelar rapat pleno perdana dengan agenda pemilihan ketua. Rapat tersebut digelar di kantor KPU RI, Jakarta, yang hasilnya menetapkan Hasyim Asy'ari sebagai ketua.

"Rapat pleno ini menghasilkan keputusan secara aklamasi, yaitu menetapkan Hasyim Asy'ari SH M.Si., Ph.D sebagai Ketua KPU RI, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PK.01-BA/03/2022 dan Surat Keputusan KPU Nomor 102 Tahun 2022," demikian keterangan pers KPU RI. (ashar,ist,ant/dya)

Realisasi Penyaluran BLT Minyak Goreng Surabaya Capai 72%

SURABAYA- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng di Kota Surabaya terus digeber. Setelah sebelumnya digelar di Kecamatan Rungkut dan Kecamatan Simokerto, kali ini BLT Minyak Goreng sekaligus bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan di kantor Kecamatan Kenjeran, Minggu (17/4).

Secara simbolis, penyaluran bantuan itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Pepen Nazaruddin, dan juga Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri, Faozan Amar.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa total ada sebanyak 220 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima secara simbolis bantuan di kantor Kecamatan Kenjeran. Ini lokasi yang ketiga karena sebelumnya sudah dilakukan di Rungkut dan Simokerto.

"Alhamdulillah lancar semuanya. Kita juga bisa melihat kecepatan-

kecepatan yang dilakukan oleh PT Pos maupun BNI, sehingga ini bersama-sama memberikan yang terbaik untuk warga, karena warga juga tidak perlu menunggu lama di sini," kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, ia sangat bersyukur dan menyampaikan terimakasih banyak kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, karena melalui Dirjen akhirnya berbagai bantuan itu bisa disalurkan mendekati lebaran. Apalagi, yang dicairkan itu langsung bersamaan, mulai dari BLT Minyak Goreng, PKH dan BPNT. "Insyallah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Surabaya yang sampai hari ini masih masuk ke dalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)," ujarnya.

Menurutnya, berkat kerjasama dan sinergi dari semua pihak, terutama dukungan dari Dirjen, saat ini penyaluran BLT Minyak Goreng di Kota Surabaya paling besar, karena sudah mencapai 72 persen. "Jadi, saya terimakasih banyak atas dukungannya Pak Dirjen, sehingga kami di Surabaya ini terus berjibaku untuk

menyiapkan data sekaligus pencairannya, biar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Surabaya," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Pepen Nazaruddin menyampaikan terimakasih kepada Wali Kota Eri karena realisasi penyaluran BLT Minyak Goreng di Surabaya sudah mencapai 72 persen. "Jadi, realisasi BLT Minyak Goreng di Surabaya sudah sangat bagus, saya harap bisa segera 99 persen. Saat ini (penyalurannya) terus dikebut, karena targetnya selesai sebelum lebaran," kata Pepen.

Ia juga berharap kepada warga Kota Surabaya yang telah menerima bantuan ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab, mereka adalah orang yang beruntung sudah



Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdiskusi dengan warga disela-sela penyaluran BLT minyak goreng di Kecamatan Kenjeran, Minggu (17/4/2022). (Foto-humas)

mendapatkan bantuan ini. "Jadi, tolong dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat," tegasnya.

Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Kemensos RI Faozan Amar mengatakan bahwa secara umum, penyaluran BLT Minyak Goreng di Surabaya sudah berjalan dengan baik. Bahkan, ia mengakui bahwa penyaluran BLT Minyak Goreng di Surabaya sudah bagus, karena saat ini sudah mencapai 72 persen. (mira,rls/dya)

Dapat Hibah Infrastruktur Rp 229,5 M, 14 Ruas Jalan di Blitar Segera Diperbaiki

BLITAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mendapatkan hibah infrastruktur jalan dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 229,5 miliar. Dana tersebut akan direalisasikan untuk perbaikan dan peningkatan 14 ruas jalan.

Disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Jumali, SPd.MAP, kesepakatan hibah infrastruktur tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, M Zaenal Fatah di Gedung BSDM, Jakarta. "Nilainya Rp 229,5 miliar, digunakan untuk perbaikan dan peningkatan jalan," ujar Jumali, dikutip Minggu (17/4).

Dalam penandatanganan tersebut, ikut hadir Wakil Bupati (Wabup) Blitar, H Rahmat Santoso, SH.MH, Kepala BPKAD, Kurdiyanto, SE.MM dan perwakilan dari Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID).

Lebih lanjut Jumali menjelaskan hibah infrastruktur tersebut merupakan salah satu program pemerintah pusat, solusi masalah infrastruktur karena adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah. "Sehingga tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan infrastruktur, diantaranya untuk perawatan dan perbaikan jalan,"



Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah dan Wabup Blitar, H Rahmat Santoso, SH.MH didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPKAD dan Tim TP2ID Kab Blitar, menunjukkan kesepakatan hibah infrastruktur dengan Sekjen Kementerian PUPR di Jakarta. (Foto-istimewa)

jelasnya.

Penggunaan hibah infrastruktur ini, daerah hanya menerima manfaat saja. Sedangkan pelaksanaannya, mulai dari perencanaan seluruhnya dilakukan oleh Kementerian PUPR. "Realisasinya akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan 14 ruas jalan," terang Jumali.

Sementara itu Bupati Blitar, Rini Syarifah mengatakan bantuan hibah infrastruktur jalan sebesar Rp 229,5 miliar ini merupakan tahap pertama, masih akan ada tahap berikutnya.

"Dimana masih ada hibah tahap kedua sebesar Rp 225 miliar, berupa Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM)," kata Bupati Blitar perempuan pertama ini.

Wabup Blitar, Rahmat Santoso menuturkan kalau didapatkannya hibah infrastruktur ini, merupakan salah satu bukti hasil kerja nyata Bupati dan Wabup Blitar. "Serta wujud komitmen Pemkab Blitar, dalam upaya memenuhi janji politik untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat," tutur orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini.

Ditambahkan Wabup Rahmat, selama ini Pemkab Blitar terus berupaya melakukan inovasi memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan yang menjadi prioritas. "Baik ke Pemprov maupun pusat, termasuk memanfaatkan program pendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan warga Kabupaten Blitar," imbuhnya. (ariefsukaputra/*)

14 RUAS JALAN DI BLITAR SEGERA DIPERBAIKI

- Sumberejo-Dawuhan
- Kademangan-Dawuhan
- Sumberejo-Suruwadang
- Suruwadang-Lorejo
- Kaligrenjeng-Tambakrejo
- Pasiraman-Kaligrenjeng
- Lorejo-Pasiraman
- Kedawung-Sumberasri
- Kedawung-Penataran
- Brongkos-Ngembul
- Ngembul-Rejoso
- Rejoso-Binangun
- Binangun-Mojorejo
- Mojorejo-Ringinrejo

Miliki 31 Silsilah Omicron, WHO Peringatkan Tes Corona RI Menurun



(Ilustrasi) Vaksinasi Covid-19 terus digalakan oleh pemerintah Indonesia jelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri. (Foto-dok)

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap tiga provinsi yang masih melaporkan peningkatan kasus per 4 hingga 10 April dalam laporan terbarunya. Kenaikan paling banyak dicatat Maluku yakni 100 persen.

Dua provinsi lainnya Papua Barat melaporkan kenaikan 24 persen selama sepekan, disusul Nusa Tenggara Barat yang kasusnya meningkat 13 persen. Lantaran kenaikan dilaporkan mendekati libur Lebaran 2022, WHO meminta masyarakat untuk waspada.

"Upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial seperti penggunaan

masker yang pas, jaga jarak, ventilasi ruang dalam ruangan dan kebersihan tangan harus terus diterapkan di seluruh negeri, terutama dengan potensi peningkatan mobilitas selama Ramadhan dan Idul Fitri," pesan WHO dalam laporan yang dirilis di laman resmi mereka, dikutip Minggu (17/4).

Positivity rate di periode yang sama secara nasional rata-rata berada di 2,1 persen. WHO mengingatkan angka ini bisa diandalkan jika jumlah testing dilakukan sesuai standar WHO yakni satu orang per 1.000 populasi per minggu.

"Selama minggu 4 hingga 10 April, tingkat pengujian atau testing menurun menjadi 2,20 per 1000 populasi per minggu, setelah sebelumnya mempertahankan testing di lebih dari 5 orang diuji per 1000 populasi per minggu pada bulan Februari," sambung WHO.

"Penting untuk memastikan kelanjutan dari strategi pengujian yang ketat untuk mengidentifikasi dengan cepat kasus COVID-19 di antara kasus suspek atau yang dicurigai terpapar

Corona," lanjut WHO.

WHO melaporkan Indonesia memiliki 31 silsilah Omicron (dari silsilah induk B.1.529). Garis keturunan BA.2 dan BA.2.3 paling dominan di Indonesia diminggu-minggu terakhir. "Berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, subvarian Omicron BA.2 paling banyak memiliki karakteristik mutasi dengan garis keturunan BA.1," kata WHO.

Di sisi lain, WHO mengatakan pandemi Covid-19 masih jauh untuk menjadi penyakit endemik. Sebab virus ini masih dapat memicu wabah besar di seluruh dunia. Direktur Program Kedaruratan Kesehatan WHO Michael Ryan mengatakan salah jika masyarakat berpikir bahwa Covid-19 mereda dan menjadi endemik artinya akhir dari masalah.

"Saya tentu tidak percaya kita telah mencapai sesuatu yang mendekati situasi endemik dengan virus ini," kata Ryan dalam sesi tanya jawab di saluran media sosial WHO, seperti dilansir Al Jazeera yang mengutip kantor berita, Minggu (17/4). "Itu belum menjadi penyakit endemi," tegasnya.


Ryan mengatakan virus corona

belum masuk ke pola penyakit musiman atau penularan apa pun. Ia juga mengatakan virus SARS-CoV-2 yang sudah memiliki banyak varian ini tetap mampu menyebabkan wabah besar. "Jangan percaya endemik sama saja sudah selesai, ringan atau tidak masalah. Itu sama sekali tidak," kata Ryan, menyebut contoh tuberkulosis dan malaria sebagai penyakit endemik yang masih membunuh jutaan orang per tahun.

Untuk diketahui, pasien positif Covid-19 bertambah 607 orang per 17 April 2022. Dengan tambahan tersebut, saat ini total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 6.039.873. Adapun sebanyak 5.825.729 pasien dinyatakan telah sembuh dan 155.866 orang meninggal dunia.

Sebelumnya, penyebaran Covid-19 gelombang pertama tahun lalu, penambahan kasus harian terbanyak tercatat pada 15 Juli 2021 yakni 56.757 kasus. Dengan masuknya varian Omicron, rekor ini kemudian telah terpecahkan dua kali pada Februari dengan angka penambahan 57.049 kasus pada tanggal 15 Februari dan 64.718 kasus pada tanggal 16 Februari. (ashar,ist,ant/dya)

ARTIS KOREA PUN IKUTAN **PUASA RAMADAN**



Ramadan menjadi momen yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia. Tak terkecuali di Korea Selatan. Sejumlah artis Negeri Gingseng diketahui turut menjalankan puasa. Siapa saja mereka?

TAK HANYA bagi mereka yang beragama Islam saja, namun beberapa artis Korsel yang non-muslim pun turut memeriahkan ibadah ini. Hal tersebut tentu saja tidak mudah, khususnya bagi mereka yang tak terbiasa menjalankan ibadah puasa selama ini. Apalagi selain menahan haus dan lapar, puasa juga harus menahan amarah.



MANNY VARSITY

Artis satu ini menjadi satu-satunya idol KPop yang terungkap beragama muslim. Adapun dalam sebuah wawancara, beberapa personil mengungkapkan bahwa Manny tak dapat memakan kimchi jigae yang mengandung babi.

Manny merupakan salah satu anggota dari VARSITY, sebuah boy group yang melakukan debut pertama kali di Korea Selatan pada 3 Januari 2017 kemarin. VARSITY berada di bawah naungan agensi Korea's Global KCenter.

Manny sendiri sudah lama berkarier di dunia hiburan. Manny dikenal sebagai artis cilik. Ia memulai debutnya sebagai artis di usia 3 tahun. Ia juga memulai kariernya sebagai model pada usia 10 tahun. Pria kelahiran China ini merupakan keturunan Uighur. Makanan favoritnya adalah ayam, daging domba dan sapi.

Ia pun dikenal sangat jago menari. Hobinya adalah menari, tidur, menyanyi dan bermain basket. Pria kelahiran 17 November 2001 ini sangat mengidolakan Michael Jackson dan Chris Brown.



SORN

Meskipun bukan muslim, Sorn ikut berpuasa bersama teman-temannya di

CLC yaitu Leonard Lim dan Sabrina Azhar tahun lalu. Selain itu, wanita ini juga mengamati anggota keluarganya di Thailand yang memeluk agama Islam dan menjalankan puasa.

Dilansir dari Allkpop, CUBE menyebut bahwa kontrak Sorn dengan agensi sudah berakhir. Gadis asal Thailand itu memilih tak memperpanjang kontrak dan meninggalkan agensi serta grupnya. Sorn sendiri kini aktif jadi seorang youtuber dengan nama channel Produsorn. Tak main-main, ia memiliki banyak subscribers yang sudah mencapai 758 ribu.

Sementara itu, member CLC, Yujin mengatakan bahwa sebenarnya agensi sudah membubarkan grup secara tak langsung. Bahkan Yujin menyebut CUBE tak akan memberi kegiatan sebagai grup kepada para member yang tersisa.



AYANA MOON

Wanita berdarah Korea Selatan yang merupakan selebgram hijab populer di Indonesia ini juga tengah menjalankan ibadah puasa di negara asalnya. Alasannya karena sedang dalam perjalanan bisnis.

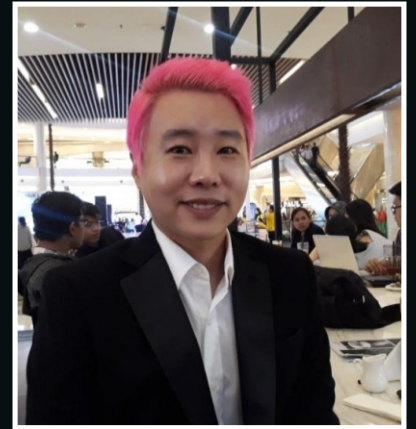
Ayana Moon merupakan selebgram hingga penulis asal Korea Selatan yang memutuskan untuk pindah agama ke Islam. Sejak kecil, Ayana telah menunjukkan ketertarikannya pada Islam. Hingga akhirnya, Ayana Moon memutuskan jadi mualaf. Namun, perjuangannya setelah mualaf makin sulit karena sering menerima hujatan.

Ketertarikan Ayana Moon kepada Islam berawal dari menonton televisi soal perang Irak pada usia sekitar 7 tahun. Saat SMP, perempuan kelahiran tahun 1995 itu penasaran dengan hijab hingga ibadah salat. memutuskan



DAUD KIM

Youtuber asal Korea Selatan yang mulai memeluk agama Islam pada 2019 lalu tersebut juga tengah berpuasa. Hal tersebut terlihat ketika dirinya membagikan videonya menyiapkan puasa pertamanya di tanah Suci.



UJUNG OPPA

YouTuber asal Korea Selatan ini mantap untuk memeluk agama Islam setelah mendengar lantunan sholawat dari Sabyan Gambus. Adapun pada tahun ini dia mulai menjalankan puasanya yang pertama dengan Kania, wanita asal Indonesia yang ia nikahi.

SAFIYA KANG

Selebgram asal Korea ini mulai tergerak masuk Islam setelah bertahun-tahun bekerja di Federasi Muslim Korea. Pemilik nama asli Kang Nayeon tersebut diketahui membuka gerai tteokbokki halal di depan Seoul Central Mosque.



SONG BORA

Selebgram asal Korea Selatan ini mulai memeluk agama Islam sejak 2007 silam. Melalui, kanal Youtube olaborasong, dia mengenalkan restoran yang menjual makanan halal Korea. Adapun saat ini yang bersangkutan berprofesi sebagai guru agama Islam dan bahasa Arab di Arab Academy Korea. (berbagai sumber/dya)

JINI HYEON

Jini Hyeon atau yang dikenal sebagai sahabat dekat Youtuber Sunny Dahye. Pemain Drama Korea ini menginap di kediaman Sunny dan Chris untuk mencoba sahur dan berpuasa untuk pertama kalinya.



Apakah Kaktus Butuh Sinar Matahari?



SAAT ini kaktus menjadi salah satu tanaman hias yang digandrungi. Tanaman ini dikenal karena dapat hidup dalam kondisi cuaca kering dan tidak mendapatkan banyak air. Akan tetapi, apakah kaktus butuh sinar matahari untuk dapat tetap hidup dan tumbuh?

Dikutip dari Cactus Way, kaktus senang berada di dekat jendela yang terpapar sinar matahari. Anda perlu memastikan kaktus atau tanaman sukulen diletakkan di dekat jendela paling terang di rumah. Posisi menghadap ke selatan akan memberikan sinar matahari yang baik, dan cahaya yang optimal tergantung pada varietas kaktus yang dimiliki.

Kaktus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tanamam ini cenderung tumbuh paling baik di banyak cahaya, suhu tinggi, kelembapan rendah, dan drainase yang baik. Namun, tidak semua kaktus tumbuh di gurun.

Meskipun beberapa spesies kaktus seperti Rhipsalis dan Hitora dapat menoleransi tingkat cahaya yang lebih rendah, tidak ada kaktus yang suka berada di ruangan gelap di rumah atau di meja kantor yang gelap. Menemukan titik terang di rumah adalah langkah pertama untuk menentukan apakah Anda bisa merawat kaktus atau tidak.

Dalam kebanyakan kasus, Anda akan melihat perubahan warna pada tanaman kaktus jika membutuhkan lebih banyak cahaya. Kaktus hijau tua perlahan akan memudar menjadi hijau pucat, sedangkan kaktus ungu, kuning, atau merah muda cerah akan kembali

ke hijau polos. Cahaya yang tidak mencukupi juga akan memengaruhi kebiasaan pertumbuhan keseluruhan kaktus.

Tanaman kaktus yang dulunya pendek, gelap, dan sehat mungkin mulai tumbuh tinggi dan pucat saat mencoba meraih lebih banyak cahaya. Ini akan segera menyebabkan pola pertumbuhan aneh yang dapat menyebabkan pertumbuhan baru menjadi jauh lebih kecil dari sisa tanaman atau kadang-kadang, cabang baru akan keluar yang cukup panjang dan seperti sulur.

Seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan kaktus? Kaktus dan tanaman sukulen lainnya harus memiliki cahaya antara 10 sampai 14 jam sehari. Jangan biarkan tanaman kaktus terkena cahaya lebih dari 14 jam dalam sehari. Rata-rata, 12 jam cahaya sehari sudah cukup untuk membuat tanaman kaktus bahagia.

Ingatlah fakta bahwa tanaman kaktus juga perlu istirahat dan memaparkannya ke lebih dari 14 jam cahaya sehari tidak akan membantunya dengan cara apa pun. Padahal, tanaman kaktus membutuhkan kegelapan untuk menyerap karbon dioksida yang akan digunakan dalam proses fotosintesis di siang hari.

Salah satu hal terpenting yang harus Anda lakukan bahkan sebelum meletakkan tanaman kaktus itu adalah memahami arah mana rumah Anda menghadap. Jika rumah Anda menghadap ke utara atau selatan, itu bagus karena mendapatkan semua eksposur cahaya.

Namun, jika rumah menghadap ke

timur atau barat, itu akan menjadi sedikit lebih sulit karena sinar matahari timur-barat tidak seterang atau sepanas sinar matahari utara-selatan. Jika Anda beruntung memiliki rumah yang menghadap ke utara atau selatan, pastikan mempelajari arah datangnya sinar matahari selama beberapa hari untuk menentukan berapa jam sinar matahari yang Anda dapatkan dalam sehari.

Ini akan memandu Anda tentang jenis kaktus mana yang harus dipilih

dan apa yang harus dihindari. Beberapa kaktus seperti kaktus biru biasanya membutuhkan beberapa jam sinar matahari panas yang tak henti-hentinya untuk berkembang.

Jika rumah menghadap ke timur atau barat, artinya Anda mendapatkan lebih sedikit sinar matahari, pilih spesies tanaman kaktus yang lebih gelap. Sebab, semakin gelap tanaman kaktus, semakin sedikit cahaya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. (berbagasi sumber/dya)

(Ilustrasi)
Apakah Kaktus Butuh Sinar Matahari?
Foto : Istimewa



Rusia Kembangkan Pakaian Tempur Robotik 'Iron Man'

RUSIA, sebagai kekuatan militer terkuat kedua di dunia, di bawah Amerika Serikat, memiliki banyak peralatan militer canggih. Negeri Beruang Merah terus mengembangkan kemampuan militernya di tengah meningkatnya ketegangan dengan blok Barat.

Berdasarkan data Global Fire Power tahun 2022, Rusia menggelontorkan anggaran pertahanan sebesar 154 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.201,5 triliun. Rusia merupakan salah satu negara adidaya. Se-perti negara besar lainnya, Rusia selalu melakukan penelitian dan pengembangan untuk dunia militer mereka. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pakaian tempur eksoskeleton di masa depan. Pakaian robotik ala Iron Man itu dikembangkan Rusia dengan segudang teknologi canggih.

Dikutip dari RT News, selain pakaian tempur robotik, Rusia juga mengembangkan kendaraan udara tak berawak (UAV). Keduanya dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pertempuran mereka.

Pakaian tempur robotik ini memiliki banyak fitur canggih. Seperti night vision, filter air, alat komunikasi nirkabel, masker gas, dan lain-lain. Bahkan pakaian ini juga antipeluru yang membuat penggunanya tak terluka sekalipun ditembak dengan kaliber 50.

Pengembangan pakaian robotik atau disebut juga ratnik ini sudah dimulai Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan ribu unit pakaian telah dikirim ke militer mereka sejak 2020 lalu. "Proses upgrade pakaian tempur ratnik tidak berhenti semenit pun," kata Jenderal Angkatan Darat Rusia, Oleg Salyukov.

Menurut dia, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas personel tempur. Tak hanya baju robot, program ini juga mencakup pengembangan UAV mini



(Ilustrasi)
Rusia Kembangkan Pakaian Tempur Robotik 'Iron Man'
Foto :Istimewa

dan mikro. "Proses upgrade pakaian tempur Ratnik tidak berhenti semenit pun," jelasnya.

"Berkenaan dengan pakaian 'prajurit masa depan', pekerjaan ekstensif telah dilakukan tahun lalu, bersama dengan perusahaan industri dalam negeri, untuk memasukkan subsistem 'robot' baru sebagai bagian dari pakaian tempur seorang prajurit," tambahnya.

Salyukov juga mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil mengembangkan Kalashnikov AK-12 yang sedang dalam proses pengiriman ke unit militer.

Selain senjata yang ditingkatkan, Ratnik juga menyertakan helm yang ditingkatkan dengan kemampuan termal dan penglihatan malam serta sistem komunikasi modern. Pakaian tempur ini juga memiliki pemanas mandiri, masker gas, dan peralatan medis. Tahun lalu, dilaporkan bahwa hampir 300.000 pakaian tempur Ratnik telah dikirim hingga saat ini.

Menurut Rostec, perusahaan induk dari pengembang pakaian tersebut, fitur utama dari kit ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan karakteristik fisik prajurit dan misi tempur yang dilakukan

Senjata AK-12 ini nantinya akan melengkapi pakaian tempur robotik sebagai bagian dari efektifitas pertempuran. Pengembangan pakaian robotik ini mendapat beragam respons dari warganet usai diposting oleh akun @wowfact.id di Instagram.

"Hebat.....sudah ga mikir minyak goreng, BPJS, korupsi," celetuk seorang warganet. (berbagai sumber/dya)

BERIKUT PERALATAN MILITER PALING CANGGIH RUSIA

1. Tank T-14 Armata

Tank T-14 Armata didesain Ural Design Bureau of Transport Machine-Building, Uralvagonzavod, untuk Angkatan Bersenjata Rusia. Tank ini merupakan generasi kelima Rusia dengan panjang total 10,8 meter. Tidak hanya itu, persenjataan dari tank ini menggunakan sistem digital. Kru terbantu dalam mengoperasikannya karena sistem pada alat ini memungkinkan kendaraan berjalan secara otomatis.

2. Rudal S-400

Sistem pertahanan udara S-400 dapat mendeteksi target udara dalam radius hingga 600 kilometer serta dapat menghancurkan target dalam radius 400 kilometer. Selain itu sistem ini dapat mendeteksi serta menyingkirkan rudal, baik jenis penjelajah yang mampu bermanuver maupun rudal balistik berhulu ledak nuklir.

3. Pesawat Pengebom Tupolev Tu-160M

Pesawat Tupolev Tu-160M dijuluki Angsa Putih mampu membawa rudal strategis. NATO juga menjuluki pesawat ini dengan Blackjack. Tu-160M merupakan pesawat supersonik pembawa rudal strategis, mampu menyerang musuh di daerah terpencil dengan senjata nuklir dan konvensional. Saat ini, Tupolev Tu-160M memegang gelar sebagai pesawat militer supersonik terberat di dunia.

4. Kendaraan Terbang Avangard

Avangard mempunyai jangkauan antarbenua dengan kemampuan terbang 27 kali kecepatan suara serta mampu melewati pertahanan rudal musuh. Kendaraan ini diklaim mampu menghindari dari pelacakan radar pertahanan Amerika Serikat (AS). Daya ledak rudal yang dibawa Avangard mencapai 2 megaton atau 130 kali lebih kuat dari bom atom yang menghancurkan Kota Hiroshima, Jepang.

5. Peluncur S-1 Pantsir

S-1 Pantsir adalah peluncur rudal yang juga mempunyai senjata anti-pesawat. Pada S-1 Pantsir disematkan senjata berupa dual 2A38M kaliber 30 mm dan rudal udara ke permukaan jenis 57E6 sebanyak 12 buah. Penggunaan senjata 2A38M kaliber 30 mm pada sistem pertahanan udara dapat mengenai target dengan jarak hingga 5 kilometer. (berbagai sumber diolah)

Awas Suka Makanan Pedas Picu Jerawat dan Ruam

MENYANTAP makanan dengan cabai tentu akan sangat menggugah selera, apalagi jika kamu penggemar. Selain menambahkan cita rasa pada makanan, cabai juga dapat memberikan sejumlah manfaat. Mengutip Eat This, makanan pedas dapat membantu penurunan berat badan, menurunkan risiko penyakit jantung, bahkan depresi.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam British Medical Journal, orang yang makan makanan pedas selama enam sampai tujuh hari per minggu menunjukkan pengurangan risiko kematian hingga 14 persen.

Meski memberikan banyak manfaat, makanan pedas yang dikonsumsi secara berlebihan juga akan memberikan dampak negatif bagi tubuh. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah dampak negatif makanan pedas bagi tubuh, yang dirangkum dari berbagai sumber.

Menyebabkan diare

Sudah bukan rahasia jika makan makanan pedas adalah salah satu penyebab paling umum di balik sakit perut dan diare. Menurut sebuah penelitian tahun 2021, zat capsaicin yang ada di dalam cabai dapat mengiritasi lapisan perut jika dikonsumsi secara berlebihan. Gejala yang dihasilkan dari mengonsumsi makanan pedas berlebihan adalah mual, muntah, sakit perut, dan diare yang membara.

Menyebabkan jerawat dan eksim

Seorang dokter kulit yang



(Ilustrasi)
Awas Suka Makanan Pedas
Picu Jerawat dan Ruam
Foto-foto : Berbagai sumber

berbasis di Florida, Rebecca Tung, mengatakan bahwa makanan pedas dapat menjadi penyebab munculnya jerawat. "Ketika makanan pedas menyebabkan peradangan di usus, mulai dari sakit perut, refluks asam, atau gejala lainnya, terkadang peradangan ini juga dapat terlihat pada kulit yang memerah, berjerawat, atau bahkan eksim," kata Tung, dikutip dari Eat This.

Menyebabkan insomnia

Jika Ladies menyukai makanan yang pedas, akan lebih baik jika dikonsumsi pada saat siang hari. Menurut beberapa ahli kesehatan, mengonsumsi makanan pedas mendekati waktu tidur atau di malam hari tidak disarankan karena berbaring akan membuat tidak nyaman. Selain itu, makanan pedas yang ditambah dengan rasa asam dapat menyebabkan insomnia karena akan merasa mulas. Apalagi jika seseorang memiliki penyakit asam lambung (GERD), ini akan menjadi masalah besar.

Mengiritasi tenggorokan

Mengonsumsi terlalu banyak makanan pedas menjadi salah satu

hal yang menyebabkan iritasi pada tenggorokan. Jika kamu adalah seseorang yang menderita refluks asam, ini dapat menyebabkan muntah, rasa sakit, bengkak, dan suara serak.

Menyebabkan lecet dan ruam

Mengonsumsi makanan pedas juga berpotensi memunculkan masalah pada kulit. Makanan pedas dapat merangsang reseptor di kulit yang biasanya merespon panas. Reseptor tersebut adalah serat nyeri, yang dikenal sebagai nosiseptor polimodal. Selain merespons suhu ekstrem dan stimulasi mekanis yang intens, seperti mencubit dan memotong, serat ini juga merespons pengaruh kimia tertentu, termasuk zat yang ada di dalam cabai. Sehingga, jika dikonsumsi secara berlebihan akan membuat kulit lecet dan ruam.

Nah, setelah mengetahui dampak negatif mengonsumsi cabai bagi tubuh, Ladies tentu perlu berhati-hati. Bukan tidak boleh sama sekali mengonsumsinya, tetapi akan lebih baik jika disesuaikan dengan kemampuan mentoleransi rasa pedas dan tidak berlebihan, ya. (berbagasi sumber/dya)



Menerka Sentilan AS ... (dari hal 1)

AMERIKA SERIKAT menyoroiti sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Laporan HAM Indonesia 2021 di situs resmi Kedutaan Besar AS di Indonesia.

Beberapa dugaan pelanggaran HAM yang disoroti, seperti dari penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Terkait laporan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD tampak tidak ambil pusing. Menurutnya, jumlah pelanggaran HAM di Indonesia sejatinya lebih rendah ketimbang AS. "Kalau soal keluhan dari masyarakat kita punya catatan AS justru lebih banyak dilaporkan Special Procedures Mandate Holders (SPMH)," ungkap Mahfud, dikutip Minggu (17/4).

Berdasarkan catatannya, Indonesia dilaporkan melanggar HAM oleh berbagai elemen masyarakat sebanyak 19 kali pada 2018-2021. Sedangkan AS dilaporkan 76 kali dalam periode yang sama.

Mahfud MD juga menyindir balik Amerika Serikat soal penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Menurut Mahfud, penanganan Covid-19 oleh Amerika tak lebih baik dari Indonesia. "Harus diketahui bahwa Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia di dalam penanganan Covid. Itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika dalam menangani Covid ini," katanya.

Mahfud kemudian mengutip data Lowy Institute Australia soal performa sebuah negara dalam menangani pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa Amerika merupakan salah satu negara yang berada di barisan paling bawah.

Sementara, kata dia, Indonesia jauh di atas Amerika dan peringkat nomor 1 di Asean dalam penanganan Covid. "Pak Airlangga, Menko Perekonomian pernah menyampaikan presentasi di dunia, Indonesia dalam aspek tertentu penanganan Covid itu ranking 4. Jadi sudah bagus lah PeduliLindungi itu," papar Mahfud. "Bahwa ada yang terganggu kalau mau masuk mal di-scan, kemudian diketahui, lalu dibatasi gerakannya itu satu konsekuensi," tambahnya.

Mahfud menambahkan, aplikasi PeduliLindungi justru dibuat untuk menangani Covid-19 dengan baik. Namun demikian, ia tak menyangkal apabila ada pihak yang menganggap penggunaan aplikasi itu melanggar HAM.

"Mungkin dianggap melanggar HAM karena misalnya, orang yang terpantau Covid melalui PeduliLindungi lalu diketahui bahwa dia kena, dilarang menuju suatu tempat, tidak akan berdekatan dengan orang lain dan sebagainya, lalu dianggap pelanggaran HAM," tuturnya.

Diketahui, Kemenlu AS

mengeluarkan laporan berjudul '2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia'. Salah satu yang disorot dalam laporan itu terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.

Laporan itu membeberkan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal dan memantau panggilan telepon. Laporan itu menyoroiti penggunaan PeduliLindungi.

"Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan itu.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, juga mempertanyakan klaim Kemenlu AS tersebut. "Di bagian mana aplikasi PeduliLindungi dianggap melanggar hak asasi manusia? Karena dalam laporan LSM tersebut, hanya disebutkan PeduliLindungi mengumpulkan informasi dan bagaimana data tersebut disimpan dan digunakan pemerintah," ujar Sukamta, Minggu (17/4).

Terlepas dari laporan itu, pemerintah didorong untuk menjamin perlindungan data pribadi secara maksimal karena masifnya penggunaan teknologi, salah satunya melalui regulasi dan pengawasan yang ketat. "Pemerintah sejak awal senantiasa berjanji untuk menjamin perlindungan data pribadi masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut," kata dia.

"Jika ternyata memang nantinya terbukti ada pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan Kemenlu AS, maka pemerintah RI mesti legowo untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperbaiki dan memperkuat aplikasi tersebut agar tidak terjadi kebocoran data lagi," lanjutnya.

Akademisi Sepakat

Kalangan pengamat pun setuju dengan pernyataan Mahfud MD. Guru Besar Hukum Internasional UI menilai tuduhan sepihak tersebut tak perlu dipusingkan pemerintah Indonesia. "Indonesia bahkan perlu memberi pelajaran kepada AS dengan cara tidak menggubris tuduhan AS terkait aplikasi PeduliLindungi," ujarnya, Minggu (17/4).

Hikmahanto mengatakan sudah saatnya Indonesia tidak mengekor terhadap keinginan negara-negara besar, termasuk AS, dalam menjalankan kedaulatannya. Pengamat hubungan internasional itu memuji sejumlah langkah cepat pejabat tinggi Indonesia. "Mulai Kemenko Polhukam, Kemlu, hingga Kemenkes, telah melakukan bantahan," ungkapnya.

Rektor Universitas Jenderal A Yani itu bahkan menyanjung ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut di AS sendiri juga telah terjadi pelanggaran HAM. "Apa yang disampaikan oleh Mahfud sangat tepat. AS seolah memiliki otoritas untuk menyatakan negara lain salah,

tetapi tidak bila dilakukan oleh dirinya," imbuhnya.

Hikmahanto lantas mencontohkan saat peristiwa AS sedang melawan sebuah teror. Dia menyebut pemerintah AS melakukan penyadapan terhadap pembicaraan semua warga yang di AS. "Kebijakan itu tentu mereka benarkan demi keamanan AS," ujar Hikmahanto.

Seperti diketahui, Deplu AS menganalisis dugaan pelanggaran HAM pada 2021 di 200 negara di dunia. Dalam laporan tersebut, aplikasi PeduliLindungi yang ada di Indonesia diduga melakukan pelanggaran HAM karena melanggar privasi warganya.

Terpisah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, tuduhan terkait PeduliLindungi melanggar HAM tak berdasar. "Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar," kata Juru Bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Nadia menjelaskan, PeduliLindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. "Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the Covid-19 Response tahun 2020, yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan Covid-19.

Dia mengatakan aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi pada PeduliLindungi menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Seluruh fitur PeduliLindungi beroperasi dalam suatu kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.

Kemenkes, kata dia, telah melakukan kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem elektronik pada PeduliLindungi telah aman dan layak digunakan.

"Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kesehatan telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yaitu pengamanan pada aplikasi, pengamanan pada infrastruktur (termasuk pusat data) dan pengamanan data terenkripsi," ujarnya.

Selain itu, PeduliLindungi telah melalui rangkaian penilaian aspek teknis dan legalitas dalam rangka pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan penempatan data di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Dengan demikian, PeduliLindungi merupakan sistem elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab," kata Nadia.

Oleh karena itu, Nadia mengimbau semua pihak agar teliti dalam membaca laporan asli dari US State Department tersebut. "Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM. Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," kata Nadia.

Nadia menambahkan, aplikasi PeduliLindungi berkontribusi besar dalam pengendalian pandemi di Tanah Air. Sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020, aplikasi ini sudah diunduh oleh lebih dari 90 juta orang dan telah membantu mencegah warga yang terinfeksi mengakses fasilitas dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, airport, pelabuhan, hotel, dan gedung perkantoran.

Sepanjang 2021-2022, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah (vaksinasi belum lengkap) memasuki ruang publik. Aplikasi tersebut juga mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi Covid-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup. (ashar,ant,ist,rls/dya)

BEBERAPA DUGAAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA YANG DISOROTI AS

Lanjutan Hal 1...

4. PELANGGARAN TERHADAP MASYARAKAT ADAT

Dalam laporan tersebut, AS menilai ada peningkatan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat adat ketika masyarakat adat ingin mengakses hak atas tanah tradisionalnya. AS menyebut pemerintah gagal mencegah perusahaan yang seringkali berkolusi dengan aparat keamanan untuk merambah tanah masyarakat adat. "Pejabat pemerintah pusat dan daerah juga diduga menerima suap dari perusahaan pertambangan dan perkebunan sebagai imbalan atas akses tanah dengan mengorbankan masyarakat adat," bunyi laporan tersebut.

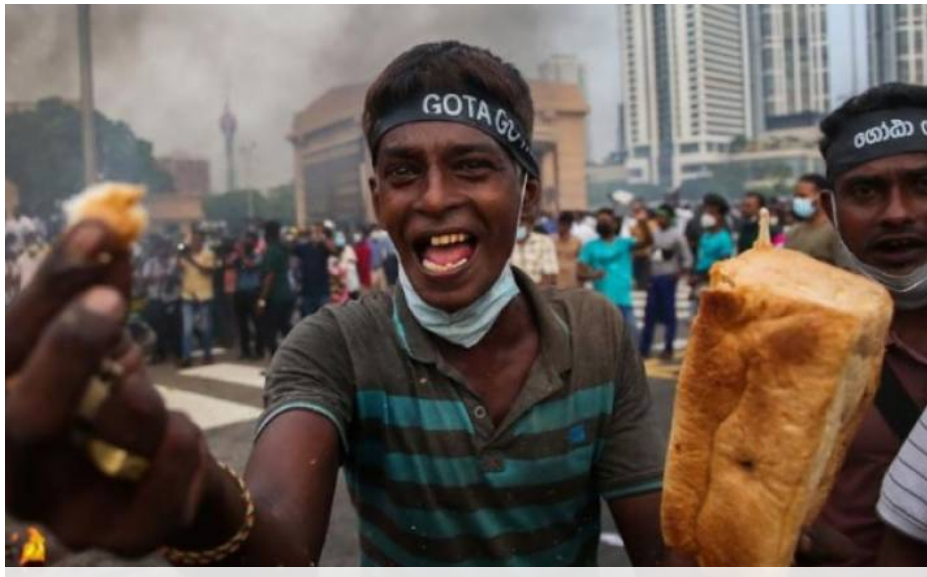
5. REPRESI DIGITAL

AS menduga ada represi digital, termasuk doxing hingga pembatasan internet yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dugaan ini mereferensi temuan LSM SAFENet yang mencurigai pemerintah membatasi layanan internet empat kali di Papua dan Papua Barat pada 2020.

6. APLIKASI PEDULILINDUNGI

Laporan itu menyebut bahwa pengelolaan data dalam aplikasi itu disesalkan oleh kelompok pendukung HAM. "LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana data disimpan dan digunakan oleh pemerintah," tulis laporan tersebut tanpa menyebut nama LSM yang dimaksud.

Banyak Negara Terjebak Utang dari Cina, RI Waspada



(Ilustrasi) Warga Sri Lanka turun ke jalan menyikapi guncangan ekonomi yang salah satunya dipicu gagal bayar utang hingga imbasnya menghantam masyarakat seperti naiknya harga pangan. (foto--istimewa)

JAKARTA- Cina dikenal sebagai negara yang kerap memberikan utang terhadap negara lain melalui skema Belt and Road Initiative (BRI). Dana yang diberikan Negeri Tirai Bambu biasanya digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur.

Namun beberapa negara di dunia harus terjebak utang akibat gencarnya

pembangunan infrastruktur yang didanai Cina. Kenya, Maladewa, hingga yang terbaru Sri Lanka terpaksa masuk 'jebakan batman' utang Beijing.

"Dari awal, kecerobohan meminjam dari Cina buat infrastruktur yang tak menguntungkan membuat negara itu di titik ini," tulis media itu, mengutip laporan Hong Kong Post,

Minggu (17/4).

Mengutip Times of India, pemerintah Sri Lanka dilaporkan meminjam utang kepada Beijing untuk sejumlah infrastruktur proyek sejak 2005, salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Total utang Sri Lanka ke Cina saat ini mencapai US\$ 8 miliar, sekitar seperenam dari total utang luar negerinya.

Namun sayangnya, sebagian proyek dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu. Cina juga meminta jatah ekspor produk mereka ke Sri Lanka senilai US\$ 3,5 miliar.

Tak hanya itu, pada awal tahun ini gagal melobi Beijing untuk restrukturisasi utang. Akibatnya, Sri Lanka kini dilanda krisis. Ini menalar dari ekonomi ke politik.

Negeri Ceylon itu mengalami kemelut terparah sejak merdeka di 1948, membuat ribuan warga bahkan turun ke jalan meminta pemerintah sekarang mundur.

Kondisi RI

Di lain sisi, Indonesia juga menjadi

salah satu penikmat utang dari Cina. Mengutip data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Februari 2022, Cina adalah pemberi utang terbesar keempat buat Indonesia. Hanya kalah dari Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

Pada Februari 2022, ULN Indonesia dari Cina tercatat US\$ 20,78 miliar. Naik 0,76% dari bulan sebelumnya (month-on-month/mtm). Dalam periode yang sama, ULN dari Singapura turun 0,75%, dari AS turun 0,22%, dan Jepang turun 0,91%.

Dari sisi mata uang, ULN terbanyak masih dalam dolar AS. Per Februari 2022, ULN berdenominasi dolar AS tercatat US\$ 275 miliar.

Di posisi kedua ada euro dengan nilai ekuivalen US\$ 25,15 miliar. Yen Jepang menempati peringkat ketiga (US\$ 24,82 miliar) dan yuan Cina berada di posisi empat (US\$ 4,31 miliar). ULN dalam dolar AS tumbuh 0,38% mtm pada Februari 2022. Sementara ULN euro naik 0,17%, yen tumbuh 0,04%, dan yuan turun 0,11%.

Sebelumnya, Tak mau seperti Sri Lanka yang telah mengemukakan gagal bayar utang luar negeri, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus menjaga penerbitan utang Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan, dia akan melakukan penyesuaian (adjustment) dari sisi tenor, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang sebelum menarik utang dengan menerbitkan obligasi pemerintah.

Sebagaimana diberitakan pada Kamis (14/4) Sri Mulyani mengatakan, APBN harus tetap sehat agar selalu siaga pada masa mendatang, meski harus berperan sebagai penambal guncangan (shock absorber). Oleh sebab itu, konsolidasi fiskal ke arah tiga persen pada tahun 2023 harus tetap dijalankan. "Menegenai kondisi utang Indonesia, kita (pemerintah) tetap menjaga konsolidasi APBN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual di Jakarta.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pihaknya memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan kerja sama burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) yang masih berlangsung sepanjang tahun 2022.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mampu membayar utang hingga kembali di level yang aman jika hasil belanja infrastruktur dan belanja untuk SDM berkualitas dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. "Sebagian utang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya," kata Sri Mulyani. "Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman," imbuhnya. (ashar, rls, ktn/dya)

TOTAL UTANG PEMERINTAH PUSAT

DI BEBERAPA ERA PEMERINTAH

